

Evaluasi Program Pemerintah Terhadap Pengolahan Usaha Sagu Di Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser

Agustinah Nasution^{1*}, Anugrahita Milenia Tri Haksami², Fikri Jufri³

Email: agustinanasution1308@gmail.com^{1*}, amt545@umkt.ac.id², fj755@umkt.ac.id³

^{1,2,3} Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Dan Bisnis Digital, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Indonesia.

Article Article Info

Received: June 9th, 2026

Revised: June 30th, 2026

Accepted: June 30th, 2026

Correspondence:

Phone: +62 811-5496-300

ABSTRACT: The purpose of this study was to identify the implementation of government programs and evaluate their impact on the development of sago processing businesses in Paser Belengkong District. The method used was a mixed methods approach, predominantly descriptive qualitative, supported by simple quantitative analysis using a Likert scale. Data were obtained through interviews with relevant agencies and questionnaires distributed to four sago business owners. The results showed that the level of knowledge (12.5), program implementation (12.75), and program benefits (10.5) were in the sufficient category, indicating that the program was running but not yet optimally and evenly. Meanwhile, the level of program sustainability and expectations (21.25) were in the highly expected category. This indicates that business owners have high expectations for the sustainability of the government program. Therefore, increased outreach, equity, and mentoring are needed to ensure the program runs more optimally and sustainably.

Keywords: Program, sustainably, bussines, sago.

Citation: Nasution, A., Haksami, A. M. T. dan Jufri, F. (2026). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Terhadap Pengolahan Usaha Sagu (*Metroxylon sagu* Rottb.) Di Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser. Rawa Sains: Jurnal Sains STIPER Amuntai, 16(1), 48-56. DOI : <https://doi.org/10.36589/rs.v16i1.329>.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan proporsi penduduk bekerja di sektor pertanian yang cukup besar. Sekitar 29 persen tenaga kerja Indonesia setara $\pm 38,7$ juta orang beraktivitas di sektor pertanian, sehingga sektor ini kerap dipandang sebagai pilar penting perekonomian nasional. Namun, tingginya keterlibatan tenaga kerja tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan, sebagian petani masih berada di bawah garis kemiskinan dan menghadapi beragam kerentanan. Di pedesaan, kompleksitas masalah seperti fluktuasi harga, keterbatasan infrastruktur, dan akses input memburuk dari waktu ke waktu, sehingga kondisi petani semakin memprihatinkan. Kemandirian usaha tani juga belum optimal karena rantai pemasaran masih didominasi perantara, yang membuat petani bergantung pada tengkulak dalam penjualan hasil produksi (Prastowo, 2024).

Upaya menjaga ketahanan pangan nasional, pemerintah perlu melakukan diversifikasi pangan melalui pengembangan sistem pangan yang berbasis pada potensi komoditas lokal serta memperhatikan aspek sosial, budaya, dan geografis setiap daerah. Oleh sebab itu, pemetaan dan penetapan sentra produksi pangan lokal menjadi langkah penting agar sumber daya lokal seperti sagu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan pangan nasional (Silalahi, 2024).

Sagu merupakan salah satu komoditas pangan yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok maupun pelengkap di berbagai daerah Indonesia, terutama di kawasan timur. Tanaman ini tergolong jenis liar yang umumnya tumbuh di daerah berair seperti rawa dan air payau. Pertumbuhannya cenderung subur pada lahan rawa gambut, di sepanjang aliran sungai, maupun di sekitar sumber air yang lembap. Secara umum, sagu dapat tumbuh baik di daerah dengan curah hujan tinggi dan pada ketinggian tertentu dari permukaan laut. Namun, sagu biasanya paling produktif di daerah dataran rendah, dengan kondisi lingkungan yang ideal untuk pertumbuhannya (Farisa, *et al.*, 2024).

Berdasarkan data Direktorat Jendral Perkebunan, luas areal sagu di Indonesia yang telah termanfaatkan baru mencapai 214.623 ha, yang terdiri atas 70.433 ha Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), 132.462 ha Tanaman Menghasilkan (TM), dan 11.727 ha Tanaman Rusak (TR/TTM) dengan total produksi sebesar 393.284 ton (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa sagu memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu komoditas pangan lokal di Indonesia

Pengembangan komoditas sagu sebagai pangan lokal tidak hanya dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam, tetapi juga oleh efektivitas sistem pengolahan dan dukungan kelembagaan yang menyertainya. Studi internasional menunjukkan bahwa pelaku usaha sagu di

wilayah pedesaan umumnya masih menghadapi keterbatasan dalam akses pasar, informasi, serta posisi tawar dalam rantai pasok, sehingga nilai tambah dalam pengolahan sagu belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat lokal (Trisia, *et. al.*, 2021). Di sisi lain, sagu memiliki keunggulan strategis karena mampu tumbuh di lahan marginal serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang apabila didukung oleh kebijakan dan program pemerintah yang tepat, khususnya dalam aspek pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas pelaku usaha (Sutawijaya, *et. al.*, 2025).

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan potensi lokal tersebut melalui berbagai kebijakan dan program (Putri, 2022). Program tersebut dapat berupa pemberian bantuan sarana produksi, pelatihan pengolahan hasil, penyediaan akses permodalan, hingga fasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha sagu. Tujuan utamanya yaitu untuk menambah nilai ekonomi dari produk sagu serta membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat di sekitarnya.

Di Kabupaten Paser, implementasi dukungan pemerintah terhadap pengembangan usaha sagu telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan pengolahan sagu menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti kue kenari, kue lapis, gula semut, dimsum, amplang, dan kue semprit berbahan dasar sagu, serta pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi berupa peralatan pengolahan dan rumah produksi. Program tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha, memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi proses produksi, dan mendorong pengembangan usaha berbasis komoditas lokal.

Potensi usaha pengolahan sagu di Kecamatan Paser Belengkong juga terlihat dari adanya pelaku usaha yang mampu memperoleh omset hingga Rp15 juta per bulan dari hasil pengolahan sagu. Produk sagu yang dihasilkan bahkan telah dipasarkan ke berbagai daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah melalui bantuan mesin, bahan produksi, dan pelatihan usaha kepada pelaku usaha sagu (Sorotonline.com, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha pengolahan sagu memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Namun, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah terhadap usaha pengolahan sagu di Kecamatan Paser Belengkong, sehingga tingkat keberhasilan dan manfaat program bagi pelaku usaha belum diketahui secara jelas.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih diperlukan evaluasi menyeluruh untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program pemerintah tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha di lapangan (Tahitu, *et al.*, 2016). Tidak semua pelaku usaha sagu merasakan manfaat dari program yang dilaksanakan, baik karena keterbatasan informasi, jangkauan program, maupun kendala teknis dalam pelaksanaannya.

Evaluasi pelaksanaan program pemerintah menjadi hal yang penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program telah berjalan efektif dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemerintah masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya dampak program terhadap masyarakat, sehingga diperlukan evaluasi secara berkelanjutan untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang (Hidayat, 2024).

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian untuk menelusuri bentuk pelaksanaan program pemerintah berupa pelatihan pengolahan sagu, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta fasilitasi pengembangan usaha yang telah dilaksanakan di Kecamatan Paser Belengkong. Melihat potensi pengembangan sagu di Kecamatan Paser Belengkong, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program-program tersebut serta menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan dan perkembangan usaha sagu masyarakat Kecamatan Paser Belengkong.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Mei 2026 di Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan komoditas sagu serta menjadi sentra pengolahan sagu di Kabupaten Paser. Selain itu, di wilayah tersebut terdapat pelaku usaha pengolahan sagu yang menjadi sasaran program pemerintah daerah.

Objek penelitian adalah program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan usaha pengolahan sagu, meliputi bantuan sarana, pelatihan, dan fasilitasi pemasaran. Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok, yaitu pihak pemerintah sebagai informan yang berasal dari Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Paser, serta pelaku usaha sagu sebagai responden yang berada di Kecamatan Paser Belengkong.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 pelaku usaha pengolahan sagu yang berada di Kecamatan Paser Belengkong. Namun, berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, hanya 4 pelaku usaha yang masih aktif menjalankan usaha pengolahan sagu, sedangkan 3 pelaku usaha lainnya telah berhenti beroperasi. Oleh karena itu, penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pelaku usaha yang masih aktif menjalankan usaha pengolahan sagu dan memiliki pengalaman dalam mengikuti atau mengetahui program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan usaha sagu (Sugiyono, 2018). Kriteria responden:

1. Bagi pihak pemerintah:

Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dalam program pengembangan

sagu dan memiliki informasi yang relevan terhadap penelitian, yaitu:

- a. Informan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser dipilih 1 orang untuk memperoleh informasi mengenai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan usaha sagu, khususnya program bantuan dan pelatihan yang pernah diberikan kepada pelaku usaha. Informasi yang diperoleh meliputi bantuan pada tahun 2023 serta kegiatan pelatihan pengolahan sagu menjadi berbagai produk olahan.
 - b. Informan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Paser dipilih 1 orang untuk memperoleh informasi mengenai dukungan pemerintah dalam pengembangan usaha sagu. Informasi yang diperoleh meliputi bantuan rumah produksi, serta pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai upaya meningkatkan kemampuan produksi dan pengembangan usaha.
2. Bagi pelaku usaha sagu:
- Responden penelitian dipilih dari populasi sebanyak 7 pelaku usaha pengolahan sagu di Kecamatan Paser Belengkong. Dari jumlah tersebut, hanya 4 pelaku usaha yang masih aktif menjalankan usahanya, sedangkan 3 pelaku usaha lainnya telah berhenti beroperasi. Oleh karena itu, responden ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Masih aktif menjalankan usaha pengolahan sagu.
 - b. Telah menjalankan usaha pengolahan sagu minimal 5 tahun.
 - c. Berlokasi di Kecamatan Paser Belengkong.

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed method*) dengan dominasi pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan program pemerintah dalam mendukung usaha pengolahan sagu, khususnya terkait bentuk program, proses pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi di lapangan (Setiawan, 2025).

Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai pendukung melalui analisis sederhana menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi pelaku usaha terhadap program pemerintah, meliputi aspek pengetahuan, pelaksanaan, manfaat serta keberlanjutan serta harapan program. Data kuantitatif ini digunakan untuk memperkuat hasil analisis kualitatif sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada analisis kualitatif sebagai pendekatan utama, sementara data kuantitatif berfungsi sebagai pelengkap (*supporting data*) dalam proses interpretasi hasil penelitian (Hendrayadi *et al.*, 2023).

Teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan skala Likert. Data dari kuesioner yang diperoleh di lapangan diolah dan diinterpretasikan untuk melihat pola jawaban responden sehingga memudahkan penelitian memahami fenomena yang ditemukan (Jailani & Saksitha, 2024).

Pertanyaan Likert tersebut diberikan kepada pelaku usaha sagu untuk mengetahui sejauh mana program pemerintah dirasakan manfaatnya. Skala yang digunakan terdiri dari lima kategori:

- 1 = Sangat Tidak Setuju,
- 2 = Tidak Setuju,
- 3 = Cukup,
- 4 = Setuju, dan
- 5 = Sangat Setuju

Nilai dari masing-masing responden dijumlahkan dan dirata-ratakan untuk melihat kecenderungan penilaian terhadap setiap aspek program (Sahara & Windu, 2024).

Adapun kriteria interpretasi skala Likert yang digunakan yang sesuai dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rentang Nilai Kategori Penilaian

Rentang Nilai	Kategori Penilaian
5 – 9	Kurang diketahui / manfaat minimal
10 – 14	Cukup diketahui / manfaat terbatas
15 – 19	Diketahui dan manfaat dirasakan
20 – 25	Sangat diketahui dan manfaat signifikan

Sumber: Sugiyono, 2018

Perhitungan skor skala Likert dalam penelitian ini dilakukan untuk menilai persepsi pelaku usaha sagu terhadap program pemerintah. Skala Likert yang digunakan terdiri dari lima tingkat penilaian, yaitu 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju), yang kemudian dikonversikan menjadi skor numerik untuk dianalisis secara kuantitatif sederhana (Ibadurrahim, *et al.*, 2025).

Berdasarkan konsep evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2018), evaluasi program dilakukan untuk menilai pelaksanaan program, manfaat yang dihasilkan, serta keberlanjutan pelaksanaannya. Dengan menyesuaikan tujuan penelitian mengenai evaluasi program pemerintah dalam pengembangan usaha pengolahan sagu, indikator penelitian disusun menjadi empat aspek, yaitu pengetahuan tentang program pemerintah, pelaksanaan program pemerintah, manfaat program pemerintah, serta keberlanjutan dan harapan terhadap program. Uraian setiap indikator adalah sebagai berikut.

- a. Pengetahuan tentang Program Pemerintah
Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden mengenai program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan usaha pengolahan sagu. Butir pertanyaan meliputi pengetahuan mengenai keberadaan program, tujuan program, bentuk bantuan yang diberikan, instansi penyelenggara, serta persyaratan mengikuti program.
- b. Pelaksanaan Program Pemerintah
Indikator ini digunakan untuk mengetahui persepsi responden terhadap pelaksanaan program pemerintah. Butir pertanyaan meliputi ketepatan pelaksanaan program, kesesuaian bantuan dengan kebutuhan pelaku usaha, kemudahan memperoleh

program, pemerataan pelaksanaan program, serta kualitas pelaksanaan program.

c. Manfaat Program Pemerintah

Indikator ini digunakan untuk mengetahui manfaat program yang dirasakan oleh pelaku usaha sagu. Butir pertanyaan meliputi peningkatan keterampilan, peningkatan proses produksi, peningkatan kualitas produk, peningkatan pendapatan usaha, serta peningkatan peluang pemasaran hasil usaha.

d. Keberlanjutan dan Harapan Program

Indikator ini digunakan untuk mengetahui harapan pelaku usaha terhadap keberlanjutan program pemerintah. Butir pertanyaan meliputi harapan agar program terus dilaksanakan, adanya bantuan lanjutan, pendampingan usaha secara berkelanjutan, perluasan jangkauan program kepada seluruh pelaku usaha, serta peningkatan kualitas program pada masa mendatang.

Setiap indikator terdiri dari lima pernyataan diatas, sehingga skor minimum yang dapat diperoleh tiap indikator adalah 5 dan skor maksimum adalah 25 (Jailani & Saksitha, 2024). Perhitungan skor dilakukan secara terpisah untuk setiap indikator, agar dapat menganalisis tiap aspek secara spesifik.

Kategori penilaian ditentukan menggunakan metode interval. Perhitungan interval dilakukan dengan membagi selisih antara skor maksimum dan skor minimum ke dalam empat kategori penilaian. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Interval} = \frac{(\text{Skor maksimum} - \text{Skor minimum})}{\text{Jumlah kategori}}$$

$$\text{Interval} = \frac{(25 - 5)}{4}$$

$$\text{Interval} = 5$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, kategori penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5–9 (kurang diketahui/manfaat minimal), 10–14 (cukup diketahui/manfaat terbatas), 15–19 (diketahui dan manfaat dirasakan), dan 20–25 (sangat diketahui dan manfaat signifikan) (Jailani & Saksitha, 2024). Kategori penilaian tersebut menjadi acuan dalam menginterpretasikan skor yang diperoleh dari jawaban responden pada setiap indikator penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi penelitian difokuskan pada Desa Pasir Belengkong dan Desa Suliliran yang dipilih karena memiliki potensi komoditas sagu serta terdapat pelaku usaha yang aktif melakukan pengolahan sagu.

Gambaran Usaha Pengolahan Sagu

Usaha pengolahan sagu di Kecamatan Paser Belengkong merupakan usaha berbasis komoditas lokal yang dilakukan oleh empat pelaku usaha yang tersebar di dua desa. Di Desa Pasir Belengkong terdapat satu pelaku usaha, sedangkan di Desa Suliliran terdapat tiga pelaku usaha.

Terdapat perbedaan kondisi usaha antara kedua desa tersebut. Pelaku usaha di Desa Pasir Belengkong telah memperoleh dukungan pemerintah berupa sarana produksi yang mendukung proses pengolahan secara lebih modern. Sementara itu, pelaku usaha di Desa Suliliran masih menggunakan peralatan semi modern dan sebagian proses produksi dilakukan secara manual. Kegiatan pengolahan sagu juga dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air yang menentukan ketersediaan bahan baku.

Harga jual sagu basah di tingkat pelaku usaha berkisar antara Rp3.500–Rp4.000 per kilogram. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana produksi, belum meratanya dukungan program pemerintah, serta keterbatasan pengelolaan limbah. Meskipun demikian, usaha pengolahan sagu memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui peningkatan dukungan sarana, pelatihan, dan perluasan akses pemasaran.

Program pemerintah yang menjadi objek evaluasi dalam penelitian ini merupakan kegiatan pengembangan komoditas unggulan daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser. Bentuk program yang dilaksanakan meliputi pelatihan diversifikasi produk olahan sagu, pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi berupa rumah produksi dan peralatan pengolahan sagu, serta pendampingan dalam pengembangan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan instansi terkait, program tersebut dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2025 sebagai bagian dari upaya pengembangan industri kecil berbasis komoditas lokal. Namun, informasi mengenai nama program secara administratif maupun besaran anggaran pelaksanaan tidak dapat diperoleh karena tidak dipublikasikan kepada peneliti dan tidak termasuk dalam data yang dapat diakses selama penelitian. Oleh karena itu, evaluasi dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program dan manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif serta didukung analisis kuantitatif menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi pelaku usaha terhadap program pemerintah.

Pelaksanaan Program Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Sagu

Pelaksanaan program pemerintah dalam pengembangan usaha sagu di Kecamatan Paser Belengkong diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan instansi terkait, yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Paser.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, pemerintah pernah melaksanakan pelatihan pengolahan sagu pada tahun 2023 di Desa Longikis. Pelatihan tersebut berupa pengolahan sagu menjadi beberapa produk olahan seperti kue kenari, kue lapis, dan gula semut berbahan dasar sagu. Selain pelatihan, pemerintah juga memberikan

dukungan berupa bantuan sarana pengolahan sagu untuk membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas dan hasil produksi olahan sagu. Program tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan keterampilan pelaku usaha serta mendorong pengembangan produk olahan sagu yang memiliki nilai tambah.

Berdasarkan informasi dari instansi terkait, pelaksanaan program pemerintah dalam pengembangan usaha sagu meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Pelatihan Pengolahan Usaha Sagu

Pemerintah melalui Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Paser telah melaksanakan pelatihan pengolahan sagu bagi pelaku Industri Kecil Dan Menengah (IKM). Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 24-25 juli 2025 di Banjarbaru bekerja sama dengan Balai Latihan Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, dan diikuti oleh 8 pelaku usaha. Materi pelatihan yang diberikan pengolahan sagu menjadi produk bernilai tambah seperti dimsum, amplang, dan kue sempritis berbahan dasar sagu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengolahan sagu mulai dari bahan baku hingga produk jadi (Diskominfo Tana Paser, 2025).

2) Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi

Selain pelatihan, pemerintah juga telah memberikan bantuan berupa rumah produksi dan alat pengolahan sagu kepada pelaku usaha di Desa Pasir Belengkong oleh Bapak Ardiansyah yang diterima langsung pada bulan Oktober 2025. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran proses produksi, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperbaiki kualitas hasil olahan sagu. Dengan adanya rumah produksi, kegiatan pengolahan menjadi lebih terpusat dan higienis, sedangkan bantuan alat membantu mempercepat proses produksi sehingga lebih efisien. Hal ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan jumlah produksi serta memperluas pemasaran produk olahan sagu.

Namun demikian, pelaksanaan program masih belum merata dan belum menjangkau seluruh pelaku usaha. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya alokasi anggaran untuk pengembangan usaha sagu, seiring dengan adanya prioritas pendanaan pada berbagai program dan sektor lainnya, sehingga dukungan terhadap sagu masih terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi Kabupaten Paser, pengembangan usaha sagu menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena sagu merupakan komoditas lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk unggulan daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat. Oleh karena itu, meskipun pelaksanaan program masih terbatas, pengembangan sagu tetap menjadi prioritas yang perlu didukung secara berkelanjutan.

Hasil Analisis Data Penelitian

Program pemerintah dalam pengolahan usaha sagu di Kecamatan Paser Belengkong bertujuan untuk

mendukung dan mengembangkan usaha masyarakat berbasis komoditas lokal. Melalui program tersebut, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha pengolahan sagu yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Menurut Arikunto & Jabar (2009) evaluasi program merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu program serta efektivitas setiap komponennya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks program pemerintah, evaluasi dilakukan untuk menilai bagaimana pelaksanaan program, manfaat yang dihasilkan, serta menjadi dasar dalam penyempurnaan program pada masa mendatang.

Berdasarkan konsep tersebut, evaluasi dalam penelitian ini difokuskan pada empat indikator, yaitu pengetahuan pelaku usaha terhadap program, pelaksanaan program, manfaat program, serta keberlanjutan dan harapan terhadap program. Indikator tersebut disusun dengan menyesuaikan tujuan penelitian dan karakteristik program pengembangan usaha pengolahan sagu. Hasil analisis pada masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Pengetahuan Responden terhadap Program Pemerintah

Pengetahuan responden mengenai program pemerintah yang berkaitan dengan usaha pengolahan sagu di Kecamatan Paser Belengkong dianalisis berdasarkan 5 pernyataan penilaian. Hasil penilaian tersebut disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Pernyataan Responden terhadap Program Pemerintah

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	Total
R1	5	5	5	4	5	24
R2	2	2	2	2	2	10
R3	2	2	1	2	2	9
R4	2	1	1	2	1	7
Total Skor						50

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Berdasarkan tabel 2, total skor pernyataan pengetahuan responden tentang program pemerintah adalah 50.

Perhitungan nilai:

- Total skor : 50
- Jumlah responden : 4
- Rata rata : $50 / 4 = 12,5$

Tabel 3. Rentang Nilai dan Kategori Penilaian

Rentang Nilai	Kategori Penilaian
5 – 9	Kurang diketahui
10 – 14	Cukup diketahui
15 – 19	Diketahui
20 – 25	Sangat diketahui

Sumber: Sugiyono, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai rata-rata sebesar 12,5 berada pada rentang 10 – 14, sehingga termasuk dalam kategori cukup diketahui. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pelaku usaha terhadap

program pemerintah sudah ada, namun belum sepenuhnya merata. Satu responden sudah memahami program dengan baik, sedangkan tiga lainnya masih memiliki tingkat pengetahuan yang rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai program pemerintah belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi agar seluruh pelaku usaha dapat memahami program secara lebih baik.

2. Pelaksanaan Program Pemerintah

Pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan usaha pengolahan sagu di Kecamatan Paser Belengkong dianalisis berdasarkan 5 instrumen penilaian. Hasil penilaian responden terhadap pelaksanaan program pemerintah disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pernyataan Pelaksanaan Program Pemerintah

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	Total
R1	5	5	5	4	5	24
R2	2	2	2	2	2	10
R3	2	2	1	2	2	9
R4	2	1	1	2	1	8
Total Skor						51

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Berdasarkan Tabel 4, total skor pernyataan pelaksanaan program pemerintah adalah sebesar 51.

Perhitungan nilai:

- Total skor : 51
- Jumlah responden : 4
- Rata rata : $51 / 4 = 12,75$

Tabel 5. Rentang Nilai dan Kategori Penilaian

Rentang Nilai	Kategori Penilaian
5 – 9	Kurang diketahui
10 – 14	Cukup diketahui
15 – 19	Diketahui
20 – 25	Sangat diketahui

Sumber: Sugiyono, 2018

3. Manfaat Program Pemerintah

Manfaat program pemerintah terhadap usaha pengolahan sagu di Kecamatan Paser Belengkong dianalisis berdasarkan 5 instrumen penilaian. Hasil penilaian responden mengenai manfaat program pemerintah disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Pernyataan Manfaat Program

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	Total
R1	5	5	5	5	5	25
R2	1	2	1	1	2	7
R3	1	1	1	1	1	5
R4	1	1	1	1	1	5
Total Skor						42

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Berdasarkan Tabel 6, total skor pernyataan manfaat program pemerintah adalah sebesar 42.

Perhitungan nilai:

- Total skor : 42
- Jumlah responden : 4
- Rata rata : $42 / 4 = 10,5$

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai rata-rata sebesar 10,5 berada pada rentang 10–14, sehingga termasuk dalam kategori cukup dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat program pemerintah sudah dirasakan oleh pelaku usaha, namun belum optimal. Responden yang memperoleh bantuan cenderung merasakan manfaat yang lebih besar, seperti peningkatan keterampilan dan kemudahan dalam proses produksi. Sementara itu, responden yang belum menerima bantuan memberikan penilaian lebih rendah karena belum merasakan dampak langsung dari program tersebut. Oleh karena itu, manfaat program masih belum merata dan perlu ditingkatkan agar dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha.

4. Keberlanjutan dan Harapan Program

Keberlanjutan dan harapan pelaku usaha terhadap program pemerintah dalam pengembangan usaha pengolahan sagu di Kecamatan Paser Belengkong dianalisis berdasarkan 5 pernyataan penilaian. Hasil penilaian responden disajikan pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 7. Pernyataan Keberlanjutan dan Harapan

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	Total
R1	5	5	5	5	5	25
R2	4	4	4	4	4	20
R3	4	4	4	4	4	20
R4	4	4	4	4	4	20
Total Skor						85

Sumber: Data Primer yang diolah 2026

Berdasarkan Tabel 7, total skor pernyataan keberlanjutan dan harapan terhadap program pemerintah adalah sebesar 85.

Perhitungan nilai:

- Total skor : 85
- Jumlah responden : 4
- Rata rata : $85 / 4 = 21,25$

Tabel 8. Rentang Nilai dan Kategori Penilaian

Rentang Nilai	Kategori Penilaian
5 – 9	Kurang diketahui
10 – 14	Cukup diketahui
15 – 19	Diketahui
20 – 25	Sangat diketahui

Sumber: Sugiyono, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai rata-rata sebesar 21,25 berada pada rentang 20–25, sehingga termasuk dalam kategori sangat diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap keberlanjutan program pemerintah. Mereka menginginkan adanya dukungan yang lebih konsisten, baik dalam bentuk pelatihan lanjutan, bantuan alat, maupun pendampingan usaha. Tingginya harapan ini menunjukkan bahwa program pemerintah dinilai penting dan memberikan dampak positif, sehingga perlu dilanjutkan dan dikembangkan agar dapat mendukung keberlanjutan usaha pengolahan sagu.

Pembahasan Berdasarkan Hasil Kuesioner

Hasil dari kuesioner, diketahui bahwa pengetahuan responden terhadap program pemerintah berada pada kategori cukup diketahui dengan rata-rata skor 12,5. Hal ini menunjukkan bahwa responden pada umumnya telah mengetahui adanya program pemerintah yang berkaitan dengan usaha pengolahan sagu, namun pemahaman terhadap bentuk program dan dukungan yang diberikan masih belum merata. Nilai tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: terbatasnya frekuensi sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha, serta rendahnya tingkat pendidikan sebagian pelaku usaha sehingga menyulitkan pemahaman terhadap informasi program yang disampaikan. Selain itu dari 4 responden, hanya 1 responden (R1) yang memiliki pengetahuan tinggi karena terlibat langsung dalam program, sementara 3 responden lainnya belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung sehingga menarik rata-rata ke angka yang lebih rendah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Bagu, *et. al.*, (2022), yang menyatakan bahwa keberhasilan program pertanian sangat dipengaruhi oleh kinerja pelaksanaan di lapangan, termasuk dalam hal penyuluhan dan penyampaian informasi kepada sasaran program. Hal ini juga diperkuat oleh Sulistyawati (2020), yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan intensitas sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman pelaku usaha, di mana semakin rendah pendidikan dan semakin jarang sosialisasi dilakukan, maka semakin rendah pula pemahaman mereka terhadap program yang ada. Dengan demikian, kurang meratanya pemahaman responden dapat disebabkan oleh belum optimalnya proses penyuluhan atau sosialisasi program.

Pada indikator pelaksanaan program pemerintah, diperoleh rata-rata skor 12,75 yang termasuk dalam kategori cukup terlaksana. Hasil ini menunjukkan bahwa program pemerintah telah dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha. Nilai ini terbentuk karena dari 4 responden, hanya R1 yang merasakan pelaksanaan program secara langsung melalui bantuan rumah produksi dan peralatan, sementara 3 responden lainnya di Desa Suliliran belum menerima program serupa. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam memperluas cakupan program, sehingga pelaksanaan baru terfokus pada kelompok tertentu dan belum menjangkau seluruh pelaku usaha sagu di Kecamatan

Paser Belengkong. Hal ini memperkuat temuan Purwayanti & Putriana (2023), yang menyatakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan seringkali menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan akses dan belum meratanya jangkauan program kepada pelaku usaha. Sejalan dengan hal tersebut, keterbatasan anggaran, lemahnya sistem monitoring, dan belum meratanya distribusi program menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program pemerintah, sehingga program seringkali hanya terfokus pada kelompok tertentu dan belum dapat menjangkau seluruh sasaran secara merata (Amaliyah, 2025). Artinya, meskipun program telah ada dan dijalankan, efektivitasnya masih bergantung pada pemerataan pelaksanaan di lapangan.

Selanjutnya, pada indikator manfaat program pemerintah, diperoleh rata-rata skor 10,5 yang berada pada kategori cukup dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah telah memberikan manfaat bagi pelaku usaha, khususnya dalam mendukung proses produksi melalui bantuan alat dan rumah produksi, serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam pengolahan sagu melalui pelatihan yang diberikan, namun manfaat tersebut masih terbatas dan belum berdampak maksimal. Rendahnya nilai pada indikator ini disebabkan oleh ketimpangan penerimaan bantuan antar responden, di mana R1 memberikan skor maksimal (25) karena telah merasakan manfaat nyata berupa peningkatan efisiensi produksi dan kualitas produk, sedangkan R2, R3, dan R4 memberikan skor yang sangat rendah (7, 5, dan 5) karena belum pernah menerima bantuan secara langsung. Kondisi ini menyebabkan rata-rata skor tertarik ke bawah dan hanya berada di angka 10,5. Dengan demikian, rendahnya skor bukan berarti program tidak bermanfaat, melainkan program belum menjangkau sebagian besar pelaku usaha. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Ghina (2023), yang menyatakan bahwa meskipun program BPUM memberikan kontribusi bagi pelaku usaha, namun pelaksanaannya belum efektif dan belum merata menyebabkan manfaat belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh pelaku usaha. Hal ini juga diperkuat oleh Indah, *et. al.*, (2025) yang menegaskan bahwa sosialisasi dan pelatihan terbukti berdampak positif terhadap pelaku usaha yang terlibat langsung dalam program, namun dampaknya belum meluas secara merata kepada seluruh pelaku usaha yang tidak terjangkau, sehingga manfaat program cenderung terkonsentrasi hanya pada penerima langsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah memberikan kontribusi awal, namun masih diperlukan peningkatan efektivitas agar manfaat yang diberikan dapat lebih signifikan dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada indikator keberlanjutan dan harapan terhadap program, diperoleh rata-rata skor 21,25 yang menunjukkan kategori tinggi atau sangat diharapkan. Tingginya nilai pada indikator ini berbeda dengan ketiga indikator sebelumnya karena harapan bersifat universal baik pelaku usaha yang sudah menerima program maupun yang belum, sama-sama menginginkan adanya keberlanjutan dukungan pemerintah. R1 memberikan skor maksimal (25) karena telah merasakan manfaat nyata dan berharap program terus dikembangkan, sementara R2, R3, dan R4 masing-masing memberikan

skor 20 karena meskipun belum menerima bantuan, mereka tetap sangat mengharapkan program tersebut menjangkau usaha mereka di masa mendatang. Kondisi inilah yang mendorong rata-rata skor berada di angka 21,25 jauh lebih tinggi dibanding indikator lainnya karena seluruh responden memiliki harapan yang kuat tanpa terkecuali. Hal ini menunjukkan bahwa program yang telah dilaksanakan dinilai memiliki potensi dan manfaat, sehingga pelaku usaha berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Tingginya harapan ini juga menjadi indikator bahwa meskipun pelaksanaan program belum merata, namun keberadaannya dianggap penting dan dibutuhkan oleh pelaku usaha. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Haryati, *et. al.*, (2026) yang menyatakan bahwa tingginya harapan pelaku usaha terhadap program pemerintah menunjukkan bahwa program tersebut dianggap bermanfaat dan perlu dilanjutkan. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Sitorus (2025) bahwa pelaku usaha yang telah merasakan manfaat program cenderung memiliki harapan lebih tinggi terhadap keberlanjutan dukungan pemerintah, khususnya dalam bentuk pelatihan lanjutan dan pendampingan usaha yang lebih konsisten, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kuesioner menunjukkan bahwa program pemerintah dalam pengembangan usaha pengolahan sagu di Kecamatan Paser Belengkong telah diketahui, dilaksanakan, dan memberikan manfaat awal, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan oleh pelaku usaha.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian mengenai pelaksanaan program pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha pengolahan sagu di Kecamatan Paser Belengkong, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Program pemerintah yang dilaksanakan meliputi pelatihan pengolahan sagu bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang bekerja sama dengan Balai Latihan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan pada Juli 2025, serta pemberian bantuan sarana produksi seperti rumah produksi dan alat pengolahan sagu di Desa Pasir Belengkong. Pelaksanaan program ini telah berjalan, namun masih terbatas dalam cakupan anggaran dan penyebaran informasi sehingga belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata.
- 2) Dampak program pemerintah terhadap pengembangan usaha sagu dinilai berdasarkan empat indikator. Pengetahuan pelaku usaha terhadap program berada pada kategori cukup diketahui, pelaksanaan program pada kategori cukup terlaksana, dan manfaat program pada kategori cukup dirasakan. Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa program telah memberikan kontribusi awal, khususnya bagi pelaku usaha penerima bantuan langsung, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh

seluruh pelaku usaha. Sementara itu, indikator keberlanjutan dan harapan berada pada kategori sangat diharapkan, yang menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha, baik penerima maupun bukan penerima bantuan, sangat mengharapkan program ini terus dilanjutkan dan diperluas jangkauannya.

Secara keseluruhan, program pemerintah telah memberikan kontribusi positif awal terhadap pengembangan usaha pengolahan sagu, dengan potensi komoditas sagu di wilayah ini telah mulai dimanfaatkan, namun belum optimal melalui dukungan tersebut. Namun, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui sosialisasi, jangkauan, dan keberlanjutan agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, khususnya Program Studi Agribisnis, atas dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Paser yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, N. (2025). Dinamika Pelaksanaan Program Padat Karya Surabaya dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kecamatan Genteng. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 5(2), 116–126.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2009). Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoretis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Bagu, I., Saleh, Y., & Bakari, Y. (2022). Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 6(3), 198–205.
- Bahari, D. I., Lubis, M. M., Apriyanti, E., Affandi, M. R., & Perlambang, R. (2025). Analisis Pengaruh Pertanian Berkelanjutan terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Perdesaan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1231–1238.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2025). Buku Statistik Perkebunan 2023–2025 Jilid I. Retrieved from <https://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-statistik-perkebunan-2023-2025-jilid-i>
- Diskominfo Tana Paser. (2025). Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser: Latih Pengusaha IKM Sagu. Retrieved from <https://share.google/UZcm0C7PcfHkK7EnC>
- Dunn, William H. 2018. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press

- Farisa, S. C., Ardaniah, A., Arsela, P., Jufri, F., & Setiowati, Y. (2024). Identifikasi Jenis Dan Jumlah Tanaman Sagu (*Metroxylon Spp*) Di Desa Tanah Periuk. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1).
- Ghina, K. (2023). Evaluasi Program Dana Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021. Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Haryati, E., Zulkarnaen, Z., & Pardi, P. (2026). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Sekadau. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 5(1), 553–560.
- Hendrayadi, H., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Mixed Method Research. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 2402–2410.
- Hidayat, M. T. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Program Sembako Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu, 12(2), 122–130.
- Ibadurrahim, D. R., Atmaja, P. W., & Sugiarto, S. (2025). Pengembangan Aplikasi Android “GuruGPT” Pendukung Topik Diskusi Pembelajaran Guru SMP Menggunakan Algoritma Chain Of Thought (CoT) Prompting. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(2).
- Indah, C. L., Alfarizi, R., & Wahjono, S. I. (2025). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Di UMKM Surabaya. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)*, 5(2), 130–136.
- Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Prastowo, A. N. (2024). Evaluasi Program Panganku Dalam Menciptakan Sistem Perekonomian Berbasis Kerakyatan, 1–17.
- Purwayanti, M., & Putriana, V. T. (2023). Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan UMKM Pemerintah Daerah Studi Kasus: “Tabungan Utsman” Pemerintah Kota Bukittinggi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 6040–6051.
- Sahara, R., & Windu, S. W. (2024). Analisis Minat Masyarakat Terhadap Properti Syariah: Pendekatan Kualitatif Dengan Skala Likert dan Korelasi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 4(3), 48–54.
- Setiawan, A. (2025). Penelitian Metode Campuran (Mixed Method). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1484–1491.
- Silalahi, A. V. (2024). Kebijakan Pengembangan Sagu Nasional: Potensi, Tantangan dan Peluang Sagu untuk Ketahanan Pangan. Direktorat Jenderal Perkebunan, Indonesia. Retrieved from <https://ditjenbun.pertanian.go.id/kebijakan-pengembangan-sagu-nasional-potensi-tantangan-dan-peluang-sagu-untuk-ketahanan-pangan/>
- Sorotonline.com. (2022). Usaha Pengolahan Sagu Di Paser Miliki Omset Rp 15 Juta Perbulan. Retrieved from <https://sorotonline.com/index.php/2022/08/11/usa-ha-pengolahan-sagu-di-paser-miliki-omset-rp-15-juta-perbulan/>
- Sitorus, M. (2025). Optimalisasi Peran Pendamping Untuk Keberhasilan Usaha Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan. *Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan*, 3(1), 33–56.
- Sugiyono, S. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D. Alfabeta, Bandung.
- Sulistyawati, S. A. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Latar Belakang Pendidikan, Ukuran Usaha, Pemberian Informasi dan Sosialisasi Terhadap Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Pada Usaha Kecil Kabupaten Tegal). Universitas Pancasakti Tegal.
- Sutawijaya, I. B. G., Suwarno, A., & Hein, L. (2025). Socio-Economic Benefits of Different Indonesian Crops: Opportunities for Sago Starch in Bioplastic Development. *Sustainability*, 17(16), 7351.
- Tahitu, M. E., Saleh, A., Lubis, D. P., & Susanto, D. (2016). Capacity Building Strategy of Sago Producers in Central Maluku. *Sosiohumaniora*, 18(1), 39–46.
- Trisia, M. A., Tachikawa, M., & Ehara, H. (2021). The Role of the Sago Supply Chain for Rural Development in Indonesia: A Review and Perspective. *Reviews in Agricultural Science*, 9, 143–156.
- Wina Hariska Putri. (2022). Inclusive Governance Pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 3(2), 50–58.